

Hadis Maudhu' sebagai Ancaman Epistemik: Tinjauan Literatur tentang Asal-usul, Ciri, dan Mitigasi Sosial

Fabricated Hadith as an Epistemic Threat: A Literature Review on Its Origins, Characteristics, and Social Mitigation

Ichsan Kamil^{1*}, Zainal Arif¹, Alhafidh Nasution², Abdul Wahid³

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

² International Islamic University, Malaysia.

³ Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia.

ARTICLE HISTORY

Received: 02-03-2024

Accepted: 16-06-2025

Publishe: 30-06-2025

Keywords:

Hadith Maudhu'; Forgery of Hadith; Sanad's critique; Eye Criticism; 'Ulum al-Hadis.

Abstract: This article addresses the critical issue of maudhu' (fabricated) hadith as a significant challenge in the study of 'ulum al-hadith, given its direct impact on the authenticity of Islamic teachings as derived from the Qur'an. It aims to provide a comprehensive explanation of the concept of maudhu' hadith, covering its definition, historical emergence, driving factors, characteristic indicators in both sanad (chain of transmission) and matan (text), the jurisprudential rulings on its narration and practice, as well as the socio-religious consequences it engenders. Utilizing a literature review methodology, the study critically examines relevant books, articles, and scholarly works. The findings demonstrate that Maudhu's hadith are narrations falsely ascribed to the Prophet Muhammad (peace be upon him), rendering them unacceptable as evidence and prohibited from transmission except for the purpose of exposing their falsehood. The emergence of these fabricated hadith is influenced by diverse motives such as political conflict, adversarial strategies against Islam, ignorance, sectarian fanaticism, ethnic primordialism, and personality cults. Their dissemination creates serious problems by deepening community divisions, distorting perceptions of Islam, diminishing the prophetic image, and weakening religious motivation. Furthermore, the article emphasizes the crucial role of ulama strategies, including transmitter criticism, sanad verification, narrative comparison, the establishment of critical principles, and the codification of fabricated hadith, as essential measures to safeguard the purity of the Sunnah.

Kata Kunci:

Hadis Maudhu'; Pemalsuan Hadis; Kritik Sanad; Kritik Matan; 'Ulum al-Hadis.

Abstrak: Hadis maudhu' (hadis palsu) merupakan salah satu problem serius dalam kajian 'ulum al-hadis karena berdampak langsung pada otentisitas sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep hadis maudhu' secara komprehensif, meliputi definisi, sejarah kemunculan, faktor pendorong, karakteristik (indikator) pada aspek sanad dan matan, hukum periwayatan serta pengamalannya, hingga dampak sosial-keagamaan yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur melalui penelusuran dan analisis kritis terhadap buku, artikel, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis maudhu' adalah riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mengada-ada dan dusta, sehingga tidak dapat diterima sebagai hujjah dan haram diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kemunculan hadis maudhu' dipengaruhi oleh berbagai motif, seperti konflik politik, siasat musuh Islam, kebodohan, fanatisme mazhab/teologi, primordialisme etnis, dan kultus individu. Persebarannya memunculkan problem serius: memperuncing perpecahan umat, mendistorsi persepsi terhadap Islam, mereduksi citra kenabian, serta melemahkan semangat keagamaan. Artikel ini juga menegaskan peran strategi ulama melalui kritik perawi, verifikasi sanad, komparasi riwayat, penetapan kaidah kritik, dan kodifikasi hadis palsu sebagai langkah mitigasi untuk menjaga kemurnian Sunnah.

© 2025 Authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Corresponding Author: ✉ awahid@unida.ac.id

 <https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i1.7381>



PENDAHULUAN

Dalam struktur epistemologi Islam, hadis menempati posisi sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an sekaligus sebagai instrumen penjelas (*bayān*) atas ayat-ayat yang bersifat *mujmal*, *mutlaq*, dan *'am*. Ketergantungan struktural ini menimbulkan konsekuensi metodologis yang tidak sepele: kualitas pemahaman umat atas syariat berbanding lurus dengan kualitas verifikasi atas riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Qur'an yang terkodifikasi secara resmi sejak dini dan terpelihara melalui hafalan massal, hadis melewati fase transmisi lisan yang panjang sebelum dibukukan secara sistematis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jeda historis inilah yang membuka ruang bagi munculnya *hadis maudhu'*, yakni riwayat yang diciptakan dan disandarkan kepada Nabi secara dusta (Kuswadi, 2016); (Aslamiah, 2017).

Sebagian besar literatur memerikan hadis maudhu' secara memadai pada level deskriptif: pengertian etimologis dan terminologis, kronologi kemunculan, motif pemalsuan, ciri-ciri pada sanad dan matan, hukum periwayatan, serta upaya ulama dalam menjaga kemurnian Sunnah (Ibrahim & Jayyid, 2025). Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada rekapitulasi khazanah klasik dan jarang mengangkat hadis maudhu' ke level analisis yang lebih teoretis. Padahal, jika ditinjau dari sudut epistemologi sosial, pemalsuan hadis merupakan kasus paradigmatik tentang kegagalan rantai kesaksian (*testimony*) dalam komunitas epistemik yang menggantungkan pengetahuan normatifnya pada transmisi antarpribadi. Dalam kerangka ini, hadis maudhu' bukan hanya persoalan teks yang keliru, melainkan persoalan rusaknya mekanisme kepercayaan yang menjadi prasyarat bagi berfungsinya seluruh sistem pengetahuan keagamaan (Sperber et al., 2010).

Relevansi kajian ini semakin mengemuka ketika dihadapkan pada tatanan informasi kontemporer. Riset skala besar menunjukkan bahwa informasi palsu menyebar lebih jauh, lebih cepat, dan lebih dalam dibandingkan informasi benar, terutama karena kebaruan dan muatan emosionalnya (Vosoughi et al., 2018). Ilmuwan komunikasi dan psikologi kognitif menegaskan bahwa kerentanan terhadap berita palsu lebih banyak dijelaskan oleh absennya penalaran analitis daripada oleh bias motivasional semata (Pennycook & Rand, 2019); (Pennycook & Rand, 2021), sementara koreksi terhadap informasi keliru kerap gagal memutus pengaruhnya yang berkelanjutan (Lewandowsky et al., 2012); (Ecker et al., 2022). Pada saat yang sama, praktik keberagamaan umat Islam Indonesia semakin dimediasi oleh platform digital, sehingga otoritas keagamaan mengalami fragmentasi dan konten hadis beredar tanpa penyaringan sanad (Slama, 2018); (Lengauer, 2018); (Halim, 2018).

Pertemuan antara problem klasik dan problem kontemporer ini melahirkan sebuah kesenjangan penelitian yang belum terjawab. *Pertama*, belum tersedia model integratif yang secara eksplisit menghubungkan kondisi pemungkin, ekologi motif, indikator deteksi, dampak sosial-keagamaan, dan arsitektur mitigasi hadis maudhu' dalam satu

kerangka analitis. Literatur yang ada cenderung menyajikan komponen-komponen tersebut sebagai daftar yang berdiri sendiri tanpa relasi kausal yang dieksplisitkan. *Kedua*, komparasi sistematis antara rezim verifikasi klasik berbasis isnad dengan rezim verifikasi digital berbasis algoritma dan kolaborasi warganet masih sangat terbatas, meskipun keduanya menjalankan fungsi epistemik yang serupa, yakni menyaring klaim berdasarkan kredibilitas sumber dan plausibilitas isi (Binbeshr et al., 2021); (Fallis, 2015).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini merumuskan empat pertanyaan penelitian yang saling terkait. (1) Bagaimana definisi klasik hadis maudhu' dapat direkonstruksi menjadi kategori epistemik yang lebih presisi, dan apa implikasinya bagi status hujjah suatu riwayat? (2) Faktor struktural dan psikososial apa saja yang membentuk ekologi motif pemalsuan hadis, dan sejauh mana ekologi tersebut paralel dengan arsitektur insentif disinformasi digital? (3) Bagaimana indikator sanad dan indikator matan bekerja sebagai arsitektur deteksi, dan apa status normatif periwayatan serta pengamalan hadis maudhu' dalam konsensus ulama? (4) Dampak sosial-keagamaan apa yang ditimbulkan oleh sirkulasi hadis maudhu', dan bagaimana strategi mitigasi ulama klasik dapat ditransposisikan ke dalam kerangka tabayyun digital?

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (a) merekonstruksi konsep hadis *maudhu'* dari kategori normatif menjadi kategori epistemik melalui komparasi definisi para ulama; (b) memetakan ekologi motif pemalsuan hadis dan membandingkannya dengan pendorong disinformasi kontemporer; (c) menganalisis arsitektur deteksi sanad–matan beserta status normatif periwayatannya; dan (d) merumuskan model mitigasi yang menjembatani kritik hadis klasik dengan literasi informasi digital. Kontribusi kebaruan artikel ini terletak pada dua artefak konseptual yang dihasilkan, yaitu *Model Integratif Ancaman Epistemik Hadis Maudhu'* yang merangkai kondisi pemungkin hingga umpan balik mitigasi dalam satu alur, dan *Model Before–After Rezim Verifikasi* yang menegaskan kontinuitas fungsi disertai diskontinuitas instrument (Ma'arif et al., 2026).

Urgensi kajian ini pada konteks keindonesiaan bersifat khusus. Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar dengan tingkat penetrasi media sosial yang sangat tinggi, sehingga konsumsi konten keagamaan berlangsung dalam ekosistem yang padat, cepat, dan minim penyaringan otoritatif. Dalam ekosistem tersebut, kutipan yang diberi label sebagai sabda Nabi beredar dalam bentuk potongan gambar, video pendek, dan pesan berantai, tanpa penyebutan sanad, tanpa rujukan kitab, dan kerap tanpa pencantuman derajat kesahihan. Kajian tentang dakwah digital menunjukkan bahwa keunggulan jangkauan berjalan beriringan dengan risiko pendangkalan metodologis (Pamungkas & Halwati, 2023). Karena itu, mendudukan kembali hadis maudhu' sebagai persoalan epistemik, bukan semata persoalan fikih periwayatan, merupakan langkah yang mendesak secara akademik sekaligus relevan secara sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain integrative *literature review*, yakni tinjauan literatur yang tidak berhenti pada rekapitulasi temuan, tetapi diarahkan untuk mensintesis perspektif yang berbeda menjadi kerangka konseptual baru (Snyder, 2019). Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat konseptual dan lintas disiplin, sehingga menuntut penggabungan sumber normatif-tekstual dari tradisi 'ulum al-hadis dengan sumber empiris-teoretis dari kajian misinformasi dan epistemologi sosial. Prosedur pelaporan disusun dengan mengacu pada prinsip transparansi dan keterlacakan sebagaimana dianjurkan dalam panduan pelaporan tinjauan sistematis, meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai systematic review dalam arti sempit (Page et al., 2021).

Sumber data dibedakan menjadi dua tingkat. Sumber primer meliputi karya *kanonik 'ulum al-hadis*, khususnya *Muqaddimah Ibn al-Salah*, *Ushul al-Hadis* karya Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Nuzhat al-Nazhar* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Kitab al-Maudhu'at* karya Ibn al-Jauzi, serta *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* karya Mustafa al-Siba'i. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terindeks dan memiliki DOI aktif, dihimpun dari basis data Scopus, DOAJ, Crossref, Google Scholar, Garuda, dan Moraref, dengan rentang publikasi 2008–2026 untuk literatur kontemporer dan tanpa batas waktu untuk karya kanonik.

Penelusuran dilakukan dengan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris: "*hadis maudhu'*", "*pemalsuan hadis*", "*kritik sanad*", "*kritik matan*", "*fabricated hadith*", "*hadith authentication*", "*matn criticism*", "*misinformation*", "*disinformation*", "*epistemic vigilance*", dan "*tabayyun*". Kriteria inklusi mencakup: (a) artikel jurnal peer-reviewed dengan DOI aktif; (b) relevansi substantif dengan salah satu dari empat tema penelitian; (c) tersedia teks lengkap. Kriteria eksklusi meliputi: (a) tulisan opini, prosiding tanpa DOI, dan repositori tanpa proses telaah sejawat; (b) artikel yang hanya mengulang definisi tanpa kontribusi analitis; (c) publikasi predatoris yang tidak memenuhi standar etik penerbitan. Dari hasil penyaringan bertahap, tiga puluh sembilan artikel ber-DOI ditetapkan sebagai korpus inti, dilengkapi sumber kanonik sebagai rujukan normatif.

Analisis data dilakukan melalui thematic content analysis dengan teknik komparasi konstan. Tahapannya meliputi: (1) pembacaan menyeluruh dan ekstraksi unit makna; (2) pengodean terbuka atas unit makna menjadi kode-kode deskriptif seperti "*motif politik*", "*indikator matan*", "*fragmentasi otoritas*"; (3) pengelompokan kode ke dalam empat kategori tematik yang menjadi kerangka bagian hasil dan pembahasan; (4) komparasi lintas sumber untuk menguji konvergensi dan divergensi pandangan; dan (5) sintesis abstraktif untuk membangun model integratif dan model before–after. Komparasi lintas paradigma dilakukan secara hati-hati: kategori dari kajian misinformasi digunakan sebagai lensa pembanding fungsional, bukan sebagai reduksi tradisi hadis ke dalam kerangka sekuler.

Keabsahan temuan dijaga melalui tiga strategi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu setiap klaim substantif disandarkan pada sekurang-kurangnya dua sumber independen, satu dari khazanah klasik dan satu dari literatur kontemporer bila memungkinkan. Kedua, audit trail berupa pencatatan kode, keputusan inklusi-eksklusi, dan jejak penalaran sintesis. Ketiga, peer

debriefing melalui diskusi antarpemulis lintas institusi untuk menguji konsistensi interpretasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dinyatakan secara jujur: karena berbasis literatur, ia tidak menguji secara empiris efektivitas model yang diusulkan; korpus juga didominasi publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris, sehingga literatur berbahasa Arab kontemporer yang belum terindeks DOI kemungkinan kurang terwakili.

Alur penyaringan korpus dapat dilaporkan sebagai berikut. Penelusuran awal menghasilkan sekitar dua ratus tiga puluh rekaman. Setelah penghapusan duplikasi lintas basis data, tersisa seratus tujuh puluh empat rekaman yang disaring pada tingkat judul dan abstrak. Sebanyak sembilan puluh satu rekaman dikeluarkan karena tidak relevan secara substantif atau tidak memenuhi kriteria jenis publikasi. Delapan puluh tiga artikel dinilai pada tingkat teks lengkap, dan empat puluh empat di antaranya dikeluarkan karena tidak memiliki DOI aktif, hanya mengulang definisi tanpa kontribusi analitis, atau diterbitkan oleh penerbit yang tidak memenuhi standar etik. Dengan demikian, tiga puluh sembilan artikel ditetapkan sebagai korpus akhir, terdiri atas kelompok kajian hadis dan 'ulum al-hadis, kelompok kajian misinformasi dan psikologi kognitif, kelompok kajian Islam digital dan literasi informasi, serta kelompok metodologi tinjauan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi dan Genealogi Hadis *Maudhu'*: dari Kategori Normatif ke Kategori Epistemik

Secara etimologis, kata *maudhu'* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari akar kata *wadha'a* yang mengandung tiga lapis makna: *al-isqath* (menggugurkan), *al-tark* (meninggalkan), dan *al-iftira' wa al-ikhtilaq* (memalsukan dan mengada-ada). Ketiga makna ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk gradasi konseptual: sesuatu yang dipalsukan pada akhirnya digugurkan otoritasnya dan ditinggalkan pengamalannya. Struktur semantik semacam ini penting karena menunjukkan bahwa penamaan *maudhu'* sejak awal telah mengandung penilaian normatif, bukan sekadar label deskriptif atas kualitas riwayat.

Pada level terminologis, para ulama merumuskan definisi yang tampak beragam namun berkonvergensi pada satu inti. Ibn al-Salah menegaskan bahwa hadis *maudhu'* adalah riwayat yang diciptakan dan didustakan atas nama Rasulullah SAW secara sengaja. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib menambahkan dimensi tripartit sabda, perbuatan, dan penetapan: sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengatakan, melakukan, atau menetapkannya. Nuruddin 'Itr merumuskannya secara ringkas sebagai riwayat yang diada-adakan, sementara Lukmanul Hakim al-Indunusi al-Azhari menekankan agensi pemalsu yang mereka-reka dan menyandarkan rekaannya kepada Nabi. Konvergensi keempat definisi tersebut terletak pada tiga unsur: adanya *ikhtilaq* (rekaan), adanya *nisbah* (penyandaran kepada Nabi), dan adanya *'amd* (kesengajaan) (Kuswadi, 2016).

Rekonstruksi epistemik atas ketiga unsur ini menghasilkan pembacaan yang lebih tajam. Unsur *ikhtilaq* menempatkan hadis maudhu' pada kategori kegagalan referensial: proposisi yang diklaim tidak memiliki rujukan pada peristiwa nyata. Unsur *nisbah* menempatkannya pada kategori kegagalan provenans: klaim tentang asal-usul informasi yang tidak dapat ditelusuri kepada sumbernya. Unsur *'amd* menempatkannya pada kategori kegagalan moral-epistemik: pelaku bukan sekadar keliru, tetapi berniat menyesatkan. Perbedaan ini sejajar dengan perbedaan analitis antara *misinformation* sebagai informasi keliru tanpa niat menyesatkan dan *disinformation* sebagai informasi keliru yang disebarkan dengan niat menyesatkan (Fallis, 2015). Dengan demikian, hadis maudhu' dalam pengertian yang ketat lebih tepat dipadankan dengan *disinformation*, sedangkan penyandaran keliru akibat kelalaian periwayat, sebagaimana dicatat oleh M. M. Azami sebagai kategori kedua, lebih dekat dengan *misinformation*.

Konsekuensi dari rekonstruksi ini bersifat substantif, bukan terminologis belaka. Jika hadis maudhu' dipahami terutama sebagai kegagalan provenans, maka fokus kritik bergeser dari sekadar menilai isi teks menuju menilai integritas rantai kesaksian yang mengangkut teks tersebut. Inilah rasionalitas di balik sentralitas isnad dalam tradisi Sunni, yang oleh Brown disebut sebagai upaya menghindari subjektivitas nalar individual dengan menyubordinasikan penilaian makna kepada pemeriksaan rantai transmisi (Brown, 2012). Epistemologi sosial kontemporer sampai pada kesimpulan struktural yang serupa: manusia mengembangkan mekanisme kewaspadaan epistemik yang bekerja pada dua sasaran sekaligus, yaitu terhadap kredibilitas sumber dan terhadap koherensi isi (Sperber et al., 2010).

Tipologi yang ditawarkan M. M. Azami memperkuat pembacaan ini. Azami membedakan penyematan palsu kepada Nabi ke dalam dua kategori: pemalsuan yang dilakukan secara sengaja, dan penyandaran sesuatu yang bukan hadis kepada Nabi akibat kelalaian serta kurangnya kehati-hatian. Perbedaan ini memiliki nilai analitis yang tinggi karena memisahkan dimensi niat dari dimensi akibat. Dari sudut akibat, keduanya sama-sama mencemari korpus Sunnah; dari sudut niat, keduanya menuntut respons yang berbeda. Pemalsuan sengaja menuntut sanksi moral dan pencabutan otoritas periwayatan, sedangkan kelalaian menuntut perbaikan kompetensi dan pengetatan prosedur. Kegagalan membedakan keduanya berisiko melahirkan dua kekeliruan sekaligus: memperlakukan kelalaian sebagai kejahatan, atau sebaliknya, memperlakukan kejahatan epistemik sebagai kelalaian yang dapat dimaklumi.

Perbedaan penting perlu dicatat antara hadis maudhu' dan hadis *dha'if*. Mayoritas ulama memandang hadis maudhu' sebagai bentuk terburuk dari hadis *dha'if*, bahkan sebagian menempatkannya sebagai kategori tersendiri di luar klasifikasi *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Perbedaan ini bukan sekadar gradasi kualitas, melainkan perbedaan jenis. Hadis *dha'if* mengalami defisit pada kekuatan bukti; hadis maudhu' mengalami pembatalan pada status kebenarannya. Konsekuensi normatifnya berbeda pula: hadis *dha'if* masih diperdebatkan kebolehan penggunaannya dalam *fadha'il al-a'mal*, sementara hadis maudhu' haram diriwayatkan kecuali disertai penjelasan tentang

kepalsuannya. Perdebatan panjang di kalangan Sunni tentang penggunaan riwayat lemah, sebagaimana ditelusuri Brown, justru memperlihatkan bahwa garis batas antara "tidak dapat dipastikan benar" dan "dipastikan palsu" merupakan garis batas epistemik yang dijaga secara serius oleh tradisi (Brown, 2011).

Tabel 1 menjelaskan komparasi analitis atas empat definisi otoritatif tersebut beserta penekanan, unsur konstitutif, dan implikasi epistemiknya. Komparasi ini memperlihatkan bahwa perbedaan redaksional para ulama sesungguhnya merupakan perbedaan penekanan pada unsur yang berbeda dari satu struktur konseptual yang sama, sehingga keempatnya dapat dibaca sebagai saling melengkapi, bukan saling bersaing.

Tabel 1. Komparasi Definisi Hadis Maudhu' dan Implikasi Epistemiknya

Perumus	Penekanan Definisi	Unsur Konstitutif	Implikasi Epistemik
Ibn al-Salah	Riwayat yang diciptakan dan didustakan atas nama Nabi secara sengaja	<i>Ikhtilaf + nisbah + 'amd</i>	Kegagalan referensial dan moral-epistemik; setara disinformasi
Muhammad 'Ajjaj al-Khatib	Penyandaran dusta atas sabda, perbuatan, dan penetapan Nabi	<i>Nisbah tripartit (qauli, fi'li, taqriri)</i>	Memperluas cakupan objek pemalsuan melampaui teks verbal
Nuruddin 'Itr	Riwayat yang diada-adakan dan dibuat-buat	<i>Ikhtilaf</i>	Menegaskan ketiadaan rujukan peristiwa; kegagalan referensial
Lukmanul Hakim al-Azhari	Pemalsu mereka-reka lalu menyandarkan rekaannya kepada Nabi	<i>Agensi pemalsu + nisbah</i>	Menyorot pelaku sebagai simpul kegagalan provenans
Sintesis penulis	Klaim testimonial yang secara sengaja dinisbahkan kepada Nabi tanpa provenans yang sah	<i>Ikhtilaf + nisbah + 'amd + kegagalan isnad</i>	Maudhu' sebagai kegagalan sistemik rantai kesaksian, bukan sekadar cacat tekstual

Sumber: diolah penulis dari Ibn al-Salah, al-Khatib, 'Itr, al-Azhari, dan Kuswadi (2016).

Ekologi Motif: Struktur Kesempatan, Insentif, dan Psikologi Pemalsuan

Dua kondisi struktural yang memungkinkan pemalsuan hadis berlangsung: belum terhipunnya hadis Nabi dalam satu kitab resmi, dan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran kedua yang memiliki daya legitimasi tinggi. Kedua kondisi ini, dalam bahasa kriminologi epistemik, membentuk *struktur kesempatan*: ada celah pengawasan sekaligus ada insentif besar bagi pihak yang berhasil mengeksploitasi celah tersebut. Analisis ini penting karena memindahkan penjelasan dari level individu (pemalsu yang jahat) ke level sistem (kondisi yang memungkinkan pemalsuan menjadi strategi rasional).

Di atas struktur kesempatan tersebut bekerja apa yang dalam artikel ini disebut sebagai *ekologi motif*. Motif pertama adalah konflik politik. Pertikaian yang menajam setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, dilanjutkan dengan konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, memunculkan faksi-faksi yang berlomba mencari legitimasi tekstual. Ketika dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang otentik tidak memadai untuk membenarkan posisi mereka, sebagian kelompok menempuh jalan takwil serampangan, dan sebagian lain menempuh jalan fabrikasi. Subhi Shalih bahkan menandai tahun 41 H sebagai titik kritis, ketika perpecahan politik melahirkan firqah dan mazhab yang menjadi penyebab utama maraknya pemalsuan khabar. Al-Qur'an relatif imun terhadap manipulasi karena telah terkodifikasi dan dihafal secara massal; hadislah yang menjadi sasaran, karena masih berada dalam sirkulasi lisan yang elastis.

Motif kedua adalah siasat musuh-musuh Islam. Ekspansi wilayah yang pesat melahirkan kelompok *zindiq*, sebagian di antaranya berkamuflase sebagai penganut tasawuf, filsafat, atau faksi tertentu. Hammad bin Zayd melaporkan bahwa kaum *zindiq* memalsukan tidak kurang dari empat belas ribu hadis. Nama-nama seperti Abdul Karim bin Abi al-Auja yang mengaku membuat empat ribu hadis palsu untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, Muhammad bin Sa'id al-Mashlub, serta Bayan bin Sam'an al-Mahdy, tercatat dijatuhi hukuman mati oleh penguasa. Motif ketiga adalah defisit ilmu. Sekelompok Muslim dengan semangat ibadah tinggi namun berbekal pengetahuan agama yang dangkal menciptakan riwayat yang menjanjikan pahala besar atas amalan kecil, atau ancaman berat atas pelanggaran ringan, dengan niat memotivasi umat. Motif "*baik*" ini justru berbahaya karena ia menormalisasi pemalsuan atas nama kebaikan.

Motif keempat adalah primordialisme dan etnosentrisme. Diskriminasi yang dialami bangsa non-Arab pada masa Bani Umayyah, yang merambah ke ranah jabatan dan pembagian rampasan perang, memicu fabrikasi yang meninggikan prestise Persia; fabrikasi tandingan dari pihak Arab pun muncul sebagai reaksi. Motif kelima adalah fanatisme mazhab dan teologi, yang melahirkan riwayat-riwayat pembenaran atas praktik fikih tertentu maupun atas posisi kalam tertentu. Motif keenam adalah kultus individu, yang tampak pada riwayat-riwayat pengagungan berlebihan terhadap tokoh, disertai vonis kekufuran bagi yang menolaknya.

Keenam motif ini memiliki padanan struktural dalam literatur disinformasi kontemporer. Konflik politik berpadanan dengan polarisasi afektif yang mendorong penyebaran berita palsu bermuatan politik; siasat lawan berpadanan dengan operasi informasi terkoordinasi; defisit ilmu berpadanan dengan kegagalan penalaran analitis dan ketergantungan pada heuristik kefasihan (Pennycook & Rand, 2019); primordialisme berpadanan dengan bias identitas kelompok; fanatisme mazhab berpadanan dengan penalaran termotivasi; dan kultus individu berpadanan dengan otoritas parasosial figur daring. Temuan Vosoughi dan kolega bahwa kebaruan dan reaksi emosional menjelaskan kecepatan difusi kabar bohong (Vosoughi et al., 2018)

menemukan gemanya dalam hadis-hadis palsu yang justru dirancang agar mengejutkan, menggugah, dan mudah diingat.

Terdapat perbedaan penting: pemalsuan hadis beroperasi dalam ruang normatif yang memiliki sanksi teologis eksplisit, yakni ancaman neraka bagi pendusta atas nama Nabi, sedangkan disinformasi digital umumnya beroperasi dalam ruang yang sanksinya longgar dan sering kali anonim. Selain itu, difusi hadis palsu pada masa klasik dibatasi oleh kapasitas transmisi lisan dan tulisan, sedangkan difusi konten digital diperkuat oleh arsitektur algoritmik yang mengoptimalkan keterlibatan pengguna (Lazer et al., 2018). Riset juga menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu terkonsentrasi pada segmen pengguna tertentu, sehingga intervensi yang tepat sasaran lebih efektif daripada intervensi massal (Guess et al., 2019). Implikasinya bagi kajian hadis: strategi mitigasi tidak cukup bersifat normatif, melainkan harus memperhitungkan distribusi aktor dan mekanisme amplifikasi.

Tabel 2 menyajikan komparasi antara motif pemalsuan hadis klasik dan pendorong disinformasi digital, disertai catatan tentang mekanisme amplifikasi dan implikasi mitigasinya.

Tabel 2. Analisis Komparatif Motif Pemalsuan Hadis dan Pendorong Disinformasi Digital

Motif Klasik	Ilustrasi Historis	Padanan Kontemporer	Mekanisme Amplifikasi	Implikasi Mitigasi
Konflik politik	Fabrikasi legitimasi faksi pasca-fitnah	Polarisasi afektif dan berita politik palsu	Homofili jaringan dan berbagi partisan	Kritik rawi berbasis kepentingan
Siasat musuh Islam	Pemalsuan masif oleh kaum zindiq	Operasi informasi terkoordinasi	Akun sintetis dan penyamaran identitas	Verifikasi provenans sumber
Defisit ilmu	Riwayat targhib-tarhib berlebihan	Kegagalan penalaran analitis	Heuristik kefasihan dan pengulangan	Literasi metodologis dan jeda reflektif
Primordialisme etnis	Klaim keutamaan bahasa dan bangsa	Bias identitas kelompok	Ruang gema komunitas	Pendidikan multikultural
Fanatisme mazhab	Riwayat pembenaran praktik fikih	Penalaran termotivasi	Kurasi selektif konten	Pluralisme metodologis
Kultus individu	Pengagungan tokoh disertai vonis kufur	Otoritas parasosial figur daring	Metrik pengikut sebagai proksi kebenaran	Desentralisasi otoritas verifikasi

Sumber: sintesis penulis atas literatur klasik 'ulum al-hadis dan riset misinformasi kontemporer.

Indikator Sanad, Indikator Matan, dan Status Normatif Perawayatan

Tradisi hadis membangun apa yang dapat disebut sebagai arsitektur deteksi. Arsitektur ini terdiri atas dua modul yang bekerja secara komplementer: modul sanad yang menilai provenans, dan modul matan yang menilai plausibilitas isi. Pada modul sanad, indikator ke-*maudhu'*-an mencakup sekurang-kurangnya tiga hal. *Pertama*, periwayat dikenal sebagai pendusta dan tidak ditemukan jalur lain yang periwayatnya *tsiqah*, sebagaimana kasus Sa'ad bin Dharif yang oleh Ibn Hibban dinyatakan sebagai pemalsu hadis. *Kedua*, pengakuan pemalsuan dari periwayat sendiri, sebagaimana pengakuan Umar bin Sabah yang memalsukan khutbah Nabi. *Ketiga*, ketidakmungkinan historis pertemuan antara periwayat dan gurunya, seperti klaim Ma'mun bin Ahmad al-Harawi yang mengaku mendengar dari Hisyam bin Ammar, padahal Hisyam wafat pada 245 H sedangkan Ma'mun baru tiba di Syam pada 250 H.

Indikator ketiga tersebut layak mendapat perhatian khusus karena memperlihatkan kecanggihan metodologis tradisi hadis. Verifikasi ketersambungan sanad dilakukan melalui rekonstruksi kronologi biografis: tahun lahir, tahun wafat, dan perjalanan intelektual setiap periwayat direkam dalam literatur *rijal* dan *thabaqat* sehingga klaim transmisi dapat difalsifikasi secara faktual. Prosedur ini secara fungsional setara dengan verifikasi metadata dan pelacakan jejak digital dalam praktik pemeriksaan fakta kontemporer, di mana klaim tentang asal-usul suatu konten diuji terhadap catatan waktu, lokasi, dan jaringan penyebaran (Binbeshr et al., 2021).

Pada modul matan, para ulama merumuskan indikator yang lebih beragam: kerancuan redaksi atau kerusakan makna; ketiadaan matan tersebut dalam hafalan para rawi dan dalam kitab-kitab hadis *mu'tabar*; pertentangan dengan ketentuan akal yang tidak dapat ditakwil, dengan pengalaman inderawi, atau dengan fakta sejarah; pertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an yang bersifat *qath'i*; muatan pelipatgandaan pahala yang tidak proporsional bagi amal kecil atau ancaman siksa berat bagi pelanggaran ringan; serta pertentangan dengan hadis mutawatir, ijma' sahabat, dan nalar sehat. Mustafa al-Siba'i menambahkan bahwa susunan gramatika yang buruk dan kesesuaian kandungan hadis dengan kepentingan penciptanya merupakan penanda kuat ke-*maudhu'*-an.

Di sinilah tradisi hadis memperlihatkan ketegangan internalnya yang produktif. Brown menunjukkan bahwa kritik matan sesungguhnya telah dipraktikkan oleh para kritikus hadis awal, meskipun aktivitas tersebut sering disamarkan dalam bahasa kritik isnad demi menangkis serangan lawan-lawan rasionalis (Brown, 2008). Sebaliknya, ketika kaidah-kaidah kritik matan dirumuskan secara eksplisit pasca-kompromi epistemologis Asy'ariyah, muncul ketegangan berupa satu ulama yang menegakkan kaidah kritik isi namun tidak menerapkannya secara konsisten, sehingga hadis yang sama dapat ditolak oleh seorang ulama dan diterima oleh ulama lain (Brown, 2012). Ketegangan ini bukan kelemahan, melainkan cerminan dari problem epistemik yang

nyata: penilaian isi selalu mengandung unsur subjektivitas yang tidak dapat sepenuhnya diformalkan.

Problem yang sama muncul dalam kajian misinformasi modern. Penilaian plausibilitas isi bergantung pada pengetahuan latar dan keyakinan sebelumnya, sehingga koreksi terhadap informasi keliru kerap gagal atau bahkan memperkuat keyakinan awal pada sebagian orang (Nyhan & Reifler, 2010). Meta-analisis menunjukkan bahwa efektivitas *debunking* bersifat terbatas dan sangat bergantung pada kualitas argumen tandingan serta pengulangan koreksi (Chan et al., 2017); (Walter & Murphy, 2018). Kesimpulan konvergen dari kedua tradisi ini jelas: verifikasi provenans lebih dapat diandalkan sebagai filter pertama, sedangkan verifikasi isi berfungsi sebagai filter kedua yang menangkap kasus-kasus yang lolos dari filter pertama. Inilah alasan mengapa kedua modul tersebut harus dipahami sebagai komplementer, bukan sekuensial-hierarkis semata.

Arsitektur deteksi ini juga menyimpan risiko kesalahan klasifikasi yang perlu dinyatakan secara eksplisit. Kesalahan tipe pertama terjadi ketika riwayat yang sesungguhnya sah ditolak karena periwayatnya dinilai lemah secara keliru, atau karena matannya dianggap bertentangan dengan nalar penilai yang sesungguhnya terbatas. Kesalahan tipe kedua terjadi ketika riwayat palsu lolos karena sanadnya direkayasa secara meyakinkan melalui praktik *tadlis*, yakni menyembunyikan cacat pada rantai transmisi. Tradisi hadis merespons risiko ini dengan mekanisme redundansi: satu riwayat diuji melalui banyak jalur, dan penilaian seorang kritikus diuji terhadap penilaian kritikus lain. Prinsip redundansi inilah yang secara metodologis paling layak diadopsi dalam verifikasi informasi digital, karena tidak ada satu pun filter tunggal, termasuk filter algoritmik, yang memiliki tingkat kesalahan nol (Binbeshr et al., 2021).

Status normatif periwayatan hadis maudhu' bersifat tegas. Berdasarkan ijma' ulama, meriwayatkan hadis yang diketahui kepalsuannya adalah haram, kecuali disertai penjelasan tentang kepalsuannya, dan keharaman ini berlaku pada semua ranah, baik hukum, kisah, maupun *targhib wa tarhib*. Nabi SAW memberikan peringatan keras bahwa berdusta atas nama beliau tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Mengenai status pelaku, terdapat dua pandangan: Abu Muhammad al-Juwaini memandang pendusta atas nama Nabi secara sengaja sebagai kafir, sedangkan jumhur ulama tidak mengafirkannya kecuali jika ia melegalkan pemalsuan tersebut, dengan konsekuensi ia dinilai fasik dan seluruh riwayatnya tertolak. Perbedaan ini memiliki makna epistemik: jumhur memisahkan antara pelanggaran moral dan pembatalan keimanan, namun sepakat pada pembatalan otoritas periwayatan. Dengan kata lain, sanksi utama yang dijatuhkan tradisi bersifat epistemik, yakni pencabutan hak untuk didengar sebagai saksi.

Tabel 3. Komparasi Modul Deteksi Sanad dan Matan serta Padanan Fungsionalnya

Dimensi	Modul Sanad (Provenans)	Modul Matan (Plausibilitas)	Padanan Kontemporer
Objek penilaian	Integritas dan ketersambungan rantai periwayat	Koherensi redaksi dan kesesuaian makna	Verifikasi sumber vs verifikasi klaim
Jenis bukti	Data biografis, kronologi wafat, penilaian jarh wa ta'dil	Konsistensi dengan Al-Qur'an qath'i, hadis mutawatir, akal, dan fakta sejarah	Metadata vs pemeriksaan fakta
Tingkat objektivitas	Relatif tinggi karena berbasis data historis yang dapat difalsifikasi	Relatif rendah karena bergantung pada pengetahuan latar penilai	Provenans vs plausibilitas
Kerentanan utama	Fabrikasi sanad dan tadlis	Subjektivitas penilai dan perbedaan mazhab	Pemalsuan jejak vs bias konfirmasi
Fungsi dalam sistem	Filter primer penyaring klaim	Filter sekunder penangkap anomali	Penyaringan berlapis

Sumber: diolah penulis dari Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Siba'i, [Brown \(2008; 2012\)](#), dan [Binbeshr et al. \(2021\)](#).

Dampak Sosial-Keagamaan dan Transposisi Mitigasi: dari Kritik Klasik ke Tabayyun Digital

Literatur klasik dan kontemporer sepakat mencatat empat dampak utama sirkulasi hadis maudhu'. *Pertama*, memicu dan mempertajam perpecahan umat, karena setiap faksi yang diserang melalui riwayat palsu cenderung membalas dengan riwayat palsu pula, sehingga terbentuk spiral delegitimasi timbal balik yang melemahkan persatuan yang diperintahkan Al-Qur'an. *Kedua*, mereduksi citra pribadi Nabi Muhammad SAW, sebab riwayat palsu tidak jarang menggambarkan beliau secara bertentangan dengan akal sehat dan fakta historis. *Ketiga*, mendistorsi persepsi terhadap Islam, karena nilai-nilai yang dipedomani umat bersumber dari hadis sebagai penjelas Al-Qur'an; jika sumbernya cacat, maka bangunan pemahaman keislaman ikut cacat. *Keempat*, melemahkan jiwa dan semangat keislaman, sebab keraguan yang lahir dari pemahaman yang keliru berujung pada penurunan motivasi keberagamaan ([Aslamiah, 2017](#)).

Keempat dampak ini mengalami amplifikasi dalam ekologi digital. Fragmentasi otoritas keagamaan memungkinkan siapa pun tampil sebagai penyampai hadis tanpa melalui rantai sanad yang teruji, sementara metrik pengikut dan interaksi berfungsi sebagai proksi kebenaran yang keliru ([Slama, 2018](#)); ([Pamungkas & Halwati, 2023](#)). Kajian tentang hoaks di kalangan Muslim Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran

informasi keagamaan yang tidak terverifikasi berkelindan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sentimen kelompok (Parhan et al., 2021).

Terhadap ancaman ini, ulama klasik telah mengembangkan arsitektur mitigasi yang komprehensif. Nuruddin 'Itr merangkumnya dalam enam langkah: meneliti karakteristik para periwayat melalui pengamatan atas perilaku dan riwayat hidup mereka; mengecam para pemalsu secara terbuka dan mengungkap keburukan mereka kepada khalayak; mensyaratkan sanad sehingga riwayat tanpa sanad dianggap batil; menguji kebenaran riwayat dengan membandingkannya melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui; menetapkan kaidah-kaidah untuk menyingkap kepalsuan; serta mengodifikasi kitab-kitab hadis maudhu' sebagai peringatan publik. Enam langkah ini bukan sekadar prosedur teknis, melainkan sebuah sistem tata kelola pengetahuan yang mencakup pengendalian input, sanksi sosial, standar bukti, redundansi verifikasi, kodifikasi kaidah, dan diseminasi peringatan.

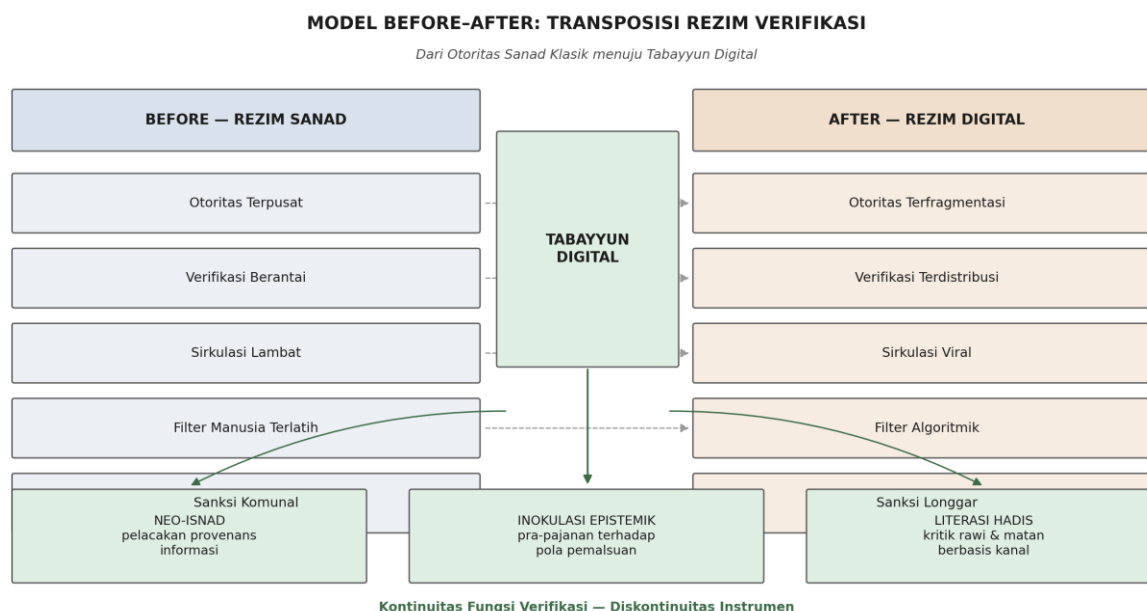
Transposisi keenam langkah tersebut ke dalam ekologi digital menghasilkan apa yang dalam artikel ini disebut *tabayyun digital*. Konsep tabayyun, yang berakar pada perintah Al-Qur'an untuk memeriksa kebenaran kabar dari sumber yang tidak kredibel, telah lama dibahas sebagai etika komunikasi Islam (Samsir & Yusril, 2024); (Nasoha et al., 2025). Kontribusi artikel ini adalah mengoperasionalkannya melalui tiga pilar yang secara langsung menurunkan fungsi mitigasi klasik. Pilar pertama, *neo-isnad*, yakni pelacakan provenans informasi keagamaan digital: siapa mengunggah, dari sumber mana, dengan rujukan kitab apa, dan dapatkah dilacak sampai ke sumber primer. Pilar kedua, *inokulasi epistemik*, yakni pra-pajanan terhadap pola-pola pemalsuan agar khalayak mengenali modus sebelum terpapar; strategi ini terbukti meningkatkan resistensi psikologis terhadap misinformasi (van der Linden et al., 2017); (Roozenbeek & van der Linden, 2019); (Compton et al., 2021). Pilar ketiga, *literasi hadis berbasis kanal*, yakni pendidikan kritik rawi dan matan yang dirancang sesuai karakter media tempat konten beredar (Subakti, 2022); (Silvana & Darmawan, 2018).

Kontinuitas fungsi disertai diskontinuitas instrumen. Fungsi epistemik isnad—menautkan klaim pada provenans yang dapat diperiksa—tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan; yang berubah adalah instrumen pelaksanaannya, dari majelis periwayatan menjadi infrastruktur digital, dari kitab *rijal* menjadi basis data terbuka, dan dari otoritas terpusat menjadi verifikasi terdistribusi. Dalam kerangka ini, koreksi kolektif oleh warganet yang terinformasi dapat berperan sebagai analog fungsional dari kecaman publik ulama terhadap pemalsu, sebagaimana ditunjukkan riset tentang efektivitas koreksi sebaya di media sosial (Bode & Vraga, 2015). Namun literasi saja tidak memadai; ia perlu ditopang oleh kelembagaan keagamaan yang berwibawa dan pendidikan yang menumbuhkan sikap kritis sekaligus inklusif (Raihani, 2012); (Abdillah, 2024).

Model ini menegaskan bahwa pemalsuan hadis bukan peristiwa tunggal melainkan proses berantai; karenanya intervensi yang hanya menyasar satu simpul, misalnya hanya melarang periwayatan, tidak akan memutus rantai secara efektif. Pertentangan lima

atribut rezim sanad klasik dengan lima atribut rezim digital, lalu menempatkan tabayyun digital sebagai jembatan yang menyalurkan fungsi lama ke dalam instrumen baru. Kedua model ini bersifat komplementer, Gambar menjelaskan mekanisme ancaman, dan pergeseran konteks yang menuntut pembaruan instrumen.

Gambar 1. Model Integratif Ancaman Epistemik Hadis Maudhu'



Implikasi praktis dari kedua model tersebut dapat dirumuskan dalam tiga tataran. Pada tataran individual, umat perlu dibiasakan menunda penyebaran sebelum memastikan provenans, sebuah kebiasaan yang secara kognitif setara dengan mengaktifkan penalaran analitis sebelum berbagi (Pennycook & Rand, 2021). Pada tataran komunitas, lembaga keagamaan dan pesantren dapat mengembangkan mekanisme verifikasi kolektif yang mengadaptasi tradisi *muqabalah* riwayat, sekaligus memanfaatkan perangkat komputasional yang kini mampu mengklasifikasi hadis berdasarkan sanad dan matan dengan akurasi yang terus meningkat (Binbeshr et al., 2021). Pada tataran kebijakan, otoritas keagamaan dan penyelenggara platform perlu bekerja sama membangun standar pelabelan konten hadis, sebagaimana koreksi yang disajikan berdampingan dengan konten keliru terbukti mengurangi kesalahpahaman (Bode & Vraga, 2015); (Lewandowsky et al., 2017).

Mitigasi berbasis koreksi memiliki batas efektivitas yang nyata. Fenomena pengaruh berkelanjutan menunjukkan bahwa informasi keliru tetap membentuk penalaran seseorang bahkan setelah koreksi diterima dan dipahami (Lewandowsky et al., 2012); (Ecker et al., 2022). Dalam konteks hadis, ini berarti bahwa membantah sebuah riwayat palsu setelah ia populer di tengah masyarakat jauh lebih sulit daripada mencegah popularitasnya sejak awal. Konsekuensi strategisnya jelas: prioritas mitigasi harus bergeser ke hulu, yakni pada pencegahan melalui inokulasi dan pembiasaan verifikasi

provenans, dan tidak semata bertumpu pada bantahan di hilir. Inilah justifikasi teoretis mengapa Model Integratif yang diusulkan menempatkan mitigasi sebagai umpan balik yang menyasar seluruh simpul, bukan sebagai tindakan terminal yang hanya bekerja setelah dampak terjadi.

Tabel 4. Transposisi Strategi Mitigasi Ulama Klasik ke dalam Kerangka *Tabayyun* Digital

Strategi Klasik	Fungsi Epistemik	Padanan Digital	Prasyarat Keberhasilan
Kritik rawi (<i>al-jarh wa al-ta'dil</i>)	Menilai kredibilitas sumber	Penilaian reputasi akun dan pelacakan rekam jejak	Transparansi identitas dan riwayat unggahan
Persyaratan sanad	Menuntut provenans yang dapat diperiksa	Neo-isnad: pelacakan rantai unggah ulang	Ketersediaan metadata dan tautan sumber primer
Komparasi riwayat	Menciptakan redundansi verifikasi	Pemeriksaan silang lintas basis data hadis	Basis data terbuka dan interoperabel
Penetapan kaidah kritik	Menstandarkan bukti dan penalaran	Kriteria pelabelan konten dan panduan editorial	Konsensus metodologis lintas mazhab
Kecaman publik terhadap pemalsu	Memberi sanksi sosial	Koreksi sebaya dan pelabelan bantahan	Etika koreksi yang menjaga martabat
Kodifikasi kitab maudhu'at	Mendiseminasikan peringatan	Repositori digital hadis palsu dan inoculasi	Aksesibilitas, kemutakhiran, dan literasi pengguna

Sumber: Enam langkah mitigasi Nuruddin 'Itr dan literatur inoculasi epistemik.

Tabel 4 merangkum komparasi antara strategi mitigasi klasik dan padanan kontemporer, sekaligus menunjukkan bagaimana setiap langkah ulama dapat ditransposisikan tanpa kehilangan fungsi epistemiknya. Perlu ditegaskan, transposisi ini bukan penggantian: perangkat digital berperan sebagai alat bantu, sedangkan otoritas penilaian akhir tetap berada pada keahlian manusia yang menguasai metodologi hadis (Brown, 2012); (Bashori, 2016).

Dengan demikian, posisi artikel ini terhadap literatur terdahulu dapat dinyatakan secara ringkas. Kajian-kajian sebelumnya di Indonesia telah memerikan hadis maudhu' secara historis-normatif dan menegaskan keharaman periwayatannya (Kuswadi, 2016); (Aslamiah, 2017); (Ibrahim & Jayyid, 2025). Kajian orientalis dan pascaorientalis, terutama Brown, telah membongkar dinamika internal kritik matan dan penggunaan riwayat lemah dalam Sunni (Brown, 2008); (Brown, 2011); (Brown, 2012). Sementara itu, literatur misinformasi telah memetakan psikologi kepercayaan dan resistansi terhadap koreksi (Pennycook & Rand, 2021); (Ecker et al., 2022). Ketiga arus ini nyaris tidak pernah dipertemukan. Sumbangan artikel ini adalah menyediakan jembatan analitis di antara ketiganya, dengan menempatkan isnad sebagai teknologi sosial

verifikasi provenans yang mendahului zamannya, dan dengan menunjukkan bahwa krisis epistemik digital dapat dibaca sebagai pengulangan struktural krisis periwayatan pada abad pertama Hijriah dalam skala yang jauh lebih besar (Fallis, 2015); (Sperber et al., 2010).

KESIMPULAN

Sejalan dengan tujuan penelitian, kajian ini menyimpulkan bahwa hadis maudhu' paling tepat dipahami bukan sekadar sebagai cacat tekstual, melainkan sebagai kegagalan sistemik rantai kesaksian yang menopang seluruh bangunan pengetahuan Islam; komparasi atas definisi Ibn al-Salah, al-Khatib, 'Itr, dan al-Azhari memperlihatkan konvergensi pada tiga unsur konstitutif berupa rekaan, penyandaran kepada Nabi, dan kesengajaan, sehingga riwayat semacam ini gugur sebagai hujjah dan haram diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Ekologi motif yang melahirkannya konflik politik, siasat lawan, defisit ilmu, primordialisme etnis, fanatisme mazhab, dan kultus individu terbukti memiliki padanan struktural dengan arsitektur insentif disinformasi kontemporer, meskipun berbeda dalam sanksi normatif dan mekanisme amplifikasinya. Arsitektur deteksi yang dibangun tradisi bekerja melalui dua modul komplementer, yakni indikator sanad yang menilai provenans secara relatif objektif dan indikator matan yang menilai plausibilitas isi dengan derajat subjektivitas yang lebih tinggi, sebuah pembagian kerja yang mendahului pembedaan modern antara verifikasi sumber dan pemeriksaan klaim. Dampak sirkulasinya berupa perpecahan umat, reduksi citra kenabian, distorsi persepsi keislaman, dan pelemahan etos keberagamaan mengalami amplifikasi dalam ekologi digital yang otoritasnya terfragmentasi. Kebaruan artikel ini terletak pada dua artefak konseptual yang ditawarkan, yaitu Model Integratif yang merangkai kondisi pemungkin hingga umpan balik mitigasi, dan Model Before–After yang menegaskan tesis kontinuitas fungsi disertai diskontinuitas instrumen. Dengan demikian, mitigasi hadis maudhu' pada masa kini menuntut transposisi enam langkah ulama klasik ke dalam kerangka tabayyun digital yang bertumpu pada neo-isnad, inokulasi epistemik, dan literasi hadis berbasis kanal, tanpa menanggalkan otoritas keahlian manusia sebagai penentu akhir penilaian.

Author Contributions: IK merumuskan konsepsi penelitian, menyusun kerangka teoretis, dan menulis draf awal keseluruhan naskah; ZA melaksanakan penelusuran serta penyaringan literatur dan memvalidasi konsistensi sitasi; AN melakukan analisis komparatif atas sumber-sumber klasik dan menyusun tabel analisis; AW mengembangkan model integratif dan model before–after, menyunting naskah secara substantif, dan bertindak sebagai penulis korespondensi; seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah yang diterbitkan.

Informed Consent Statement: Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang sepenuhnya menganalisis dokumen publik berupa kitab klasik dan artikel jurnal ilmiah, sehingga tidak melibatkan partisipan manusia maupun hewan dan karenanya tidak memerlukan persetujuan setelah penjelasan (informed consent) maupun persetujuan komite etik penelitian.

Declaration of Generative AI: Para penulis menyatakan bahwa perangkat kecerdasan artifisial generatif digunakan secara terbatas hanya untuk membantu penyuntingan bahasa, penyelarasan gaya

penulisan akademik, dan pemeriksaan konsistensi format sitasi; seluruh gagasan, argumentasi, analisis, penafsiran sumber, dan kesimpulan merupakan hasil kerja intelektual para penulis yang telah memeriksa serta bertanggung jawab penuh atas keseluruhan isi naskah.

Acknowledgments: Para penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, International Islamic University Malaysia, dan Universitas Darussalam Gontor Ponorogo atas dukungan akademik dan akses sumber daya kepastakaan, serta kepada para mitra bestari yang telah memberikan telaah kritis dan masukan konstruktif sehingga kualitas naskah ini meningkat secara signifikan.

Conflicts of Interest: Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan finansial maupun nonfinansial yang dapat memengaruhi objektivitas perancangan, pelaksanaan, penafsiran hasil, maupun pelaporan penelitian ini, dan penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemberi dana mana pun di sektor publik, komersial, maupun nirlaba.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2024). Islam and democracy: The case of the early reform era. *Jurnal Indo-Islamika*, 14(2), 357–376. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.43764>
- Aslamiah, R. (2017). Hadis maudhu dan akibatnya. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(1). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1214>
- Bashori, A. H. (2016). Studi kritis konsep sanad kitab Nahj al-Balaghah sebagai upaya membangun budaya tabayyun dalam keilmuan Islam. *El-Harakah*, 18(2), 163–182. <https://doi.org/10.18860/el.v18i2.3658>
- Binbeshr, F., Kamsin, A., & Mohammed, M. (2021). A systematic review on hadith authentication and classification methods. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*, 20(2), 1–17. <https://doi.org/10.1145/3434236>
- Bode, L., & Vraga, E. K. (2015). In related news, that was wrong: The correction of misinformation through related stories functionality in social media. *Journal of Communication*, 65(4), 619–638. <https://doi.org/10.1111/jcom.12166>
- Brown, J. A. C. (2008). How we know early ḥadīth critics did matn criticism and why it's so hard to find. *Islamic Law and Society*, 15(2), 143–184. <https://doi.org/10.1163/156851908X290574>
- Brown, J. A. C. (2011). Even if it's not true it's true: Using unreliable ḥadīths in Sunni Islam. *Islamic Law and Society*, 18(1), 1–52. <https://doi.org/10.1163/156851910X517056>
- Brown, J. A. C. (2012). The rules of matn criticism: There are no rules. *Islamic Law and Society*, 19(4), 356–396. <https://doi.org/10.1163/156851912X639923>
- Chan, M.-p. S., Jones, C. R., Hall Jamieson, K., & Albarracín, D. (2017). Debunking: A meta-analysis of the psychological efficacy of messages countering misinformation. *Psychological Science*, 28(11), 1531–1546. <https://doi.org/10.1177/0956797617714579>

- Compton, J., van der Linden, S., Cook, J., & Basol, M. (2021). Inoculation theory in the post-truth era: Extant findings and new frontiers for contested science, misinformation, and conspiracy theories. *Social and Personality Psychology Compass*, 15(6), e12602. <https://doi.org/10.1111/spc3.12602>
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L. K., Brashier, N., Kendeou, P., Vraga, E. K., & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. *Nature Reviews Psychology*, 1, 13–29. <https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y>
- Fallis, D. (2015). What is disinformation? *Library Trends*, 63(3), 401–426. <https://doi.org/10.1353/lib.2015.0014>
- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1), eaau4586. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- Halim, W. (2018). Young Islamic preachers on Facebook: Pesantren As'adiyah and its engagement with social media. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 44–60. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416796>
- Ibrahim, R., & Jayyid, D. F. (2025). Hadits maudhu' (palsu): Studi sejarah, ciri, dan upaya ulama dalam menjaga keaslian sunnah. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 2(4), 136–142. <https://doi.org/10.70134/identik.v2i4.712>
- Kuswadi, E. (2016). Hadits maudhu' dan hukum mengamalkannya. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(1), 80–88. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.1.80-88>
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lengauer, D. (2018). Sharing semangat taqwa: Social media and digital Islamic socialities in Bandung. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 5–23. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1415276>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the post-truth era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(3), 106–131. <https://doi.org/10.1177/1529100612451018>
- Ma'arif, M. G., Sinaga, A. I., Yusmardani, I., Hanifah, M. N., & Zamiri, Z. (2026). Tabayyun sebagai etika literasi digital: Analisis hadis tematik dalam merespons disinformasi di era media sosial. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 1870–1881. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep tabayyun dalam media sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 224–232. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>
- Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When corrections fail: The persistence of political misperceptions. *Political Behavior*, 32(2), 303–330. <https://doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pamungkas, A., & Halwati, U. (2023). Tantangan dakwah melalui media sosial di era media baru. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i01.4036>
- Parhan, M., Rindu, M., & Islamy, F. (2021). Media sosial dan fenomena hoax: Tinjauan Islam dalam etika berkomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition*, 188, 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Raihani. (2012). Report on multicultural education in pesantren. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 42(4), 585–605. <https://doi.org/10.1080/03057925.2012.672255>
- Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Communications*, 5, 65. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0279-9>
- Samsir, S., & Yusril, M. (2024). Konsep tabayyun dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap fenomena penyebaran hoax di media sosial. *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2(2), 96–111. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>
- Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan literasi digital di kalangan usia muda di Kota Bandung. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(2), 146–156. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i2.11327>
- Slama, M. (2018). Practising Islam through social media in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 1–4. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origgi, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. *Mind & Language*, 25(4), 359–393. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01394.x>

- Subakti, M. F. (2022). Literasi digital: Fondasi dasar dakwah dalam media sosial. *Jurnal Dakwah*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/jd.23.1.22.4>
- van der Linden, S., Leiserowitz, A., Rosenthal, S., & Maibach, E. (2017). Inoculating the public against misinformation about climate change. *Global Challenges*, 1(2), 1600008. <https://doi.org/10.1002/gch2.201600008>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Walter, N., & Murphy, S. T. (2018). How to unring the bell: A meta-analytic approach to correction of misinformation. *Communication Monographs*, 85(3), 423–441. <https://doi.org/10.1080/03637751.2018.1467564>